EDITORIAL

Bebasnya Sofyan Basir

Vonis bebas terhadap mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Sofyan Basir, amat mengherankan. Ia dinyatakan tidak terlibat korupsi kendati fakta persidangan menunjukkan sebaliknya. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kasasi perlu didukung karena bebasnya Sofyan bukan akibat dakwaan yang lemah.

Sofyan dinyatakan bebas dari segala tuntutan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Majelis hakim yang dipimpin Hariono menegaskan terdakwa tak terbukti membantu atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk korupsi. Ia juga dinyatakan tidak mengetahui adanya suap dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1.

Dengan kata lain, sebagai bos PLN, terdakwa dinilai tidak tahu-menahu soal suap yang diberikan oleh pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo demi mempermulus proyek itu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, misalnya, terbukti menerima *fee* Rp 4,75 miliar dari Kotjo. Politikus Golkar ini telah divonis 6 tahun penjara gara-gara kasus tersebut.

Politikus dari partai yang sama, Idrus Marham, juga terjerat kasus tersebut dan dihukum 5 tahun penjara. Adapun Kotjo, yang semula divonis 2 tahun 8 bulan penjara, diperberat hukumannya menjadi 4,5 tahun penjara di tingkat banding pada Februari 2019.

Penyidik KPK sebetulnya memiliki bukti dan kesaksian yang kuat mengenai keterlibatan Sofyan. Dalam persidangan, jaksa telah mengungkapkan serangkaian pertemuan terdakwa dengan Eni dan Kotjo untuk membahas proyek tersebut. Pertemuan itu antara lain terjadi di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 6 November 2017. Di sana Sofyan, Eni, dan Kotjo membahas masa pengendalian proyek itu oleh perusahaan pemegang kontrak.

Pertemuan antara Sofyan dan Eni bahkan masih terjadi sepuluh hari sebelum politikus ini dicokok KPK lewat operasi tangkap tangan pada pertengahan Juli tahun lalu. Tak cuma dibeberkan dalam sidang kasus Sofyan Basir, serentetan pertemuan yang mengindikasikan keterlibatan terdakwa juga masuk dalam berkas putusan para pelaku yang sudah divonis.

Itulah mengapa vonis bebas Sofyan sungguh janggal. Apalagi jaksa KPK menjerat terdakwa dengan pasal berlapis. Selain menerapkan delik suap, jaksa menggunakan Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan ini menjerat siapa pun yang "dengan sengaja memberikan kesempatan" untuk melakukan suatu kejahatan.

Jaksa juga melengkapinya dengan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang bisa menjaring "setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk korupsi". Dengan dakwaan seperti ini, semestinya terdakwa sulit lolos. Soalnya, jaksa tidak perlu membuktikan bahwa Sofyan kecipratan *fee* atas proyek PLTU tersebut.

Langkah KPK mengajukan kasasi bukan hanya agar jerih payah tim penyidik tidak sia-sia, tapi yang lebih penting lagi adalah demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum. ●

Demokrasi Kami Bukan Liberalisme

Osbin Samosir
Pengajar Ilmu Politik
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta

TEMPO/IMAM YUNNI

Media Inggris, *The Guardian*, menulis editorial pada edisi Ahad, 3 November lalu, mengenai periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Media itu mengkritik Jokowi tidak bisa diandalkan karena mengangkat Prabowo Subianto, rivalnya dalam pemilihan presiden selama dua periode, sebagai Menteri Pertahanan—sesuatu yang tabu bagi demokrasi Barat.

Masuknya Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, ke Kabinet Indonesia Maju membuktikan bahwa postur demokrasi Indonesia kita bukanlah demokrasi seperti yang dipahami Barat dan Amerika Serikat sebagai model demokrasi modern saat ini. Demokrasi Barat merupakan perkembangan dari liberalisme, yang tumbuh sejak akhir abad ke-19 di negara-negara Barat.

Format demokrasi Indonesia yang digagas oleh bapak pendiri bangsa adalah demokrasi gotong-royong. Bagaimana kedua demokrasi ini bisa dipahami?

Prabowo menyemarakkan peta politik Indonesia sejak pemilihan presiden 2014 dan berlanjut dalam pemilihan presiden 2019. Pertarungan antara Jokowi dan Prabowo dalam kedua pemilihan tersebut telah menguras sangat banyak energi akibat emosi primordial dan isu-isu identitas.

Sisa-sisa pergolakan politik identitas sangat terasa hingga ke masyarakat paling bawah. Tidak jarang terjadi keretakan hubungan keluarga serta putusnya hubungan persaudaraan dan pertemanan akibat pembelahan isu-isu identitas.

Dalam paham sangat sederhana, demokrasi liberal meletakkan pihak yang kalah sebagai oposisi dan menjadi penyeimbang terhadap semua kebijakan pemerintah yang berkuasa. Adam Smith, tokoh demokrasi liberalisme klasik, mengusung isu *"laissez faire et laissez passer"* yang meletakkan kebebasan individu.

Demokrasi liberal sangat menghormati martabat individu yang berwenang untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya. Negara tidak perlu terlalu banyak campur tangan karena individu bersangkutan paling paham apa yang perlu untuk dirinya.

Negara cukup sebagai "penjaga malam" saja. Maka, persaingan antarindividu sangat dianjurkan, sehingga yang bertahan hanya orang-orang yang kuat, sehat, unggul, dan berkarakter pemenang. Jadi, kepunahan si lemah adalah pupuk bagi liberalisme.

Dalam urusan bernegara, liberalisme meletakkan si pecundang di pihak oposisi. Kubu oposisi mengkritik kebijakan pemerintah dengan menawarkan solusi-solusi alternatif yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Nanti, dalam pemilihan umum, rakyat menghukum partai berkuasa jika gagal memenuhi harapan mayoritas publik dengan tidak memilihnya kembali.

Format demokrasi demikian terjadi di seluruh daratan Eropa dan Amerika, seperti dipraktikkan Partai Demokrat versus Partai Republik di Amerika Serikat atau Partai Konservatif versus Partai Buruh di Inggris. Partai-partai lain biasanya melibatkan diri ke salah satu kubu.

Walaupun Indonesia menganut prinsip demokrasi dalam sistem bernegara, demokrasi kita tidak seperti demokrasi liberal Barat dan Amerika. Format demokrasi liberal sangat tidak cocok dengan fatsun dan tata krama budaya lokal Indonesia.

Sukarno menjelaskan kelemahan demokrasi liberal dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945. "Kita sudah lihat di negara-negara Eropah... adalah *parlementaire democratie*... Tetapi tidakkah di Eropah djustru kaum kapitalis meradjalela?"

Para pendiri bangsa menolak demokrasi liberal, sebagaimana diungkapkan Sukarno: "Wakil kaum buruh jang mempunjai hak politiek itu, di dalam Parlemen dapat mendjatuhkan minister. Ia seperti Radja! Tetapi di dalam dia punja tempat bekerdja, di dalam paberik, sekarang ia mendjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar ke luar ke djalan raja, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa."

Para pendiri bangsa bersepakat bahwa demokrasi yang kita anut adalah demokrasi yang khas Indonesia. Ia digali dari dasar musyawarah yang sudah berlangsung ribuan tahun di desa-desa di seluruh Indonesia. Demokrasi yang khas itu adalah demokrasi gotong-royong. Sukarno menegaskan dalam rapat BPUPKI, 1 Juni 1945: "Gotong-rojong adalah faham jang dinamis, lebih dinamis dari 'kekeluargaan', saudara-saudara!"

Demokrasi gotong-royong tidak mengenal oposisi, mengedepankan musyawarah, menjaga harmoni, dan memelihara nilai-nilai kekrabatan dalam kohesi sosial. Demokrasi gotong-royong adalah demokrasi kekeluargaan yang menempatkan semua warga negara sebagai satu keluarga.

Supomo, dalam sidang BPUPKI, 31 Mei 1945, berujar, "Negara bersandar atas kekeluargaan.... Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan tjorak masjarakat Indonesia."

Demokrasi gotong-royong adalah khas Indonesia. Ia menjalin kebersamaan dengan semua pihak, tidak memerlukan kritik tajam yang melukai sesama anggota keluarga, apalagi sampai memecah kerukunan.

Musyawarah dikedepankan sebagai upaya mencari solusi alternatif. Fokus negara kekeluargaan adalah merekatkan semua anak-anak bangsa sebagai sebuah keluarga, persis seperti keluarga batih di lingkup kecil.

Demokrasi kekeluargaan itu dipraktikkan oleh Prabowo dengan masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Prabowo menunjukkan bahwa tidak baik memelihara jejak kelam di batin masyarakat akibat pemilihan presiden 2014 dan 2019.

Apakah Prabowo salah atas pilihan demokrasi tersebut? Bagi penganut demokrasi modern, sikap Prabowo itu salah. Tapi Prabowo setia kepada harapan para pendiri bangsa bahwa semua warga negara adalah sebuah keluarga.

Lalu bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia? Memang Indonesia tidak memiliki sejarah dan tradisi demokrasi sebagaimana demokrasi modern dipahami. Sampai saat ini, Indonesia masih mencari sosok demokrasi yang tepat untuk dirinya. Setidaknya demokrasi Indonesia mengedepankan penegakan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar demokrasi di seluruh dunia dengan bentuk atau format yang khas Indonesia, yakni gotong-royong, bukan liberalisme. ●

PT TEMPO INTI MEDIA Tbk
DIREKTUR UTAMA ... DIREKTUR ... DIREKTUR INDEPENDEN ... SEKRETARIAT KORPORAT ... IKLAN ... KOMUNIKASI PEMASARAN ... KREATIF PEMASARAN ... DESAIN KREATIF PEMASARAN ... TRAFFIC ... SIRKULASI & DISTRIBUSI ... SIRKULASI ... DISTRIBUSI ... LAYANAN PELANGGAN ... TEMPO INPRESARIO ... MATAIR ... ALAMAT TEMPO INPRESARIO ...
ALAMAT IKLAN ...
ALAMAT DIVISI SIRKULASI, KOMUNIKASI PEMASARAN, DAN DIVISI DIGITAL DAN RISET ...